

EMPIRICAL ANALYSIS OF EAST JAVA'S ECONOMIC PERFORMANCE IN 2025: ECONOMIC GROWTH, INFLATION, UNEMPLOYMENT, AND POVERTY

Oleh:

Ahmad Fathoni (ahmadfathoni@stail.ac.id)
Cynthia Herdiana Safitri (cynthia.herdiana.safitri@gmail.com)
Syamsul Ma'arif (syamsulmaarif@stail.ac.id)
STAI Luqman Al Hakim Surabaya

ABSTRACT

East Java is one of Indonesia's most strategic provinces due to its large population and diversified economic structure, with manufacturing, trade, and agriculture as the main pillars. In the post-pandemic period, the province is required not only to sustain growth but also to ensure that economic recovery translates into broader welfare improvements. This study aims to empirically assess East Java's economic performance in 2025 by examining key macroeconomic and welfare indicators—economic growth, inflation, open unemployment, and poverty—while relating them to the province's sectoral structure and the concept of quality of growth.

This research employs a descriptive-analytical design using document-based secondary data. The analysis relies primarily on official publications from Statistics Indonesia (BPS), Bank Indonesia (BI) provincial economic reports, and relevant provincial government documents, complemented by selective media summaries to enrich policy context. The analytical steps include descriptive trend assessment, comparative reading against national averages (when available), interpretative linkage across indicators, and a qualitative examination of sectoral drivers (manufacturing, trade, agriculture) to understand productivity and inclusiveness dynamics.

The results show that East Java's economy grew at a relatively stable pace, with year-on-year growth in the first quarter of 2025 reaching around 5.0%, mainly supported by domestic demand—especially household consumption and government expenditure. Inflation remained low at approximately 1.0–1.1%, indicating strong price stability, while the open unemployment rate was about 3.6%, suggesting comparatively favorable labor absorption. However, welfare outcomes still point to structural challenges: the poverty rate in March 2025 was approximately 9.5%, declining from the previous period yet remaining higher than the national average, alongside persisting spatial and socioeconomic disparities.

These findings imply that macroeconomic stability has not fully converted into inclusive welfare gains. The persistence of poverty despite low unemployment indicates potential issues of job quality, informal employment, and limited productivity improvements. Policy recommendations include strengthening inclusive growth through targeted regional development, expanding productive formal employment via skills upgrading and stronger industry–education linkages, and enhancing sectoral integration—especially agriculture–industry linkages through agro-industrialization and local value-chain development—to raise productivity, deepen value-added, and reduce inequality.

Keywords: East Java, regional economic performance, economic growth, inflation, unemployment, poverty, inclusive development.

A. Pendahuluan

Kinerja ekonomi daerah merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas tata kelola pembangunan, terutama pada wilayah dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi berpenduduk terbesar dan berstruktur ekonomi relatif beragam—dengan basis kuat pada industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian—memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam konteks pascapandemi, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mendorong pemulihan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa proses pemulihan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif. Tekanan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan permintaan global, serta dinamika kebijakan nasional turut memengaruhi capaian ekonomi daerah, sehingga evaluasi berbasis indikator makro dan kesejahteraan menjadi semakin relevan.

Pada tahun 2025, narasi kinerja ekonomi Jawa Timur cenderung menunjukkan capaian yang positif pada beberapa indikator makro, khususnya pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan kemampuan menjaga inflasi pada level rendah.¹² Namun, capaian makro tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam kajian ekonomi regional, fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep *quality of growth*, yakni kualitas pertumbuhan yang tidak cukup diukur dari besaran laju pertumbuhan semata, melainkan juga dari kapasitasnya menciptakan kesempatan kerja produktif, menurunkan kemiskinan, dan mempersempit ketimpangan antarwilayah maupun antarkelompok sosial.³ Oleh karena itu, evaluasi kinerja ekonomi provinsi perlu menempatkan indikator makroekonomi dan indikator

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, May 5). *Economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 1.14 percent (q-to-q); economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 5.00 percent (y-on-y)* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1494/economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-1-14-percent-q-to-q-economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-5-00-percent-y-on-y.html>

² Bank Indonesia. (2025). *Laporan perekonomian provinsi Jawa Timur: Mei 2025*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2025.aspx>

³ McMillan, M. S., & Rodrik, D. (2011). *Globalization, structural change and productivity growth* (NBER Working Paper No. 17143). National Bureau of Economic Research. Retrieved January 6, 2026, from <https://www.nber.org/papers/w17143>

kesejahteraan dalam satu kerangka analisis yang saling terkait.

Sejalan dengan itu, indikator inflasi dan pengangguran terbuka menjadi komponen kunci dalam menilai stabilitas ekonomi dan daya serap pasar kerja.⁴ Inflasi yang terkendali dapat mencerminkan stabilitas harga dan efektivitas koordinasi kebijakan pengendalian inflasi daerah⁵, tetapi juga perlu dibaca dalam hubungannya dengan daya beli, konsumsi rumah tangga, serta dinamika pasokan pangan dan energi.⁶ Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah dapat mengindikasikan kondisi pasar kerja yang lebih baik, namun tetap memerlukan pembacaan lebih lanjut mengenai kualitas pekerjaan, formalitas kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, stabilitas harga dan perbaikan pasar kerja merupakan prasyarat penting, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa manfaat pertumbuhan telah terdistribusi secara adil.

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan menjadi dimensi yang menentukan dalam menilai inklusivitas⁷⁸ pembangunan ekonomi.⁹ Meskipun tren kemiskinan dapat menunjukkan penurunan dari periode sebelumnya, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional menandakan adanya tantangan struktural dan spasial dalam pembangunan.¹⁰ Ketimpangan antarwilayah—misalnya antara kawasan perkotaan-industri dan wilayah pedesaan-agraris—sering

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 1). *Juni 2025 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 2,02 persen; inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 2,76 persen* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/01/1500/juni-2025-inflasi-year-on-year--y-on-y--provinsi-jawa-timur-sebesar-2-02-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kabupaten-tulungagung-sebesar-2-76-persen.html>

⁵ Rodrik, D. (2013). *Structural change, fundamentals, and growth: An overview*. Retrieved January 6, 2026, from <https://drodrik.scholars.harvard.edu/publications/structural-change-fundamentals-and-growth-overview>

⁶ Thomas, V., Dailami, M., Dhareshwar, A., Kaufmann, D., Kishor, N., López, R. E., & Wang, Y. (2000). *The quality of growth*. Oxford University Press; World Bank. Retrieved January 6, 2026, from <https://documents1.worldbank.org/curated/en/756531468780293668/pdf/multi-page.pdf>

⁷ World Bank. (2009). *World development report 2009: Reshaping economic geography*. World Bank. Retrieved January 6, 2026, from <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/19d4154e-b830-560d-bb24-0d6a9210d5c7/content>

⁸ United Nations Development Programme. (2025). *Advancing inclusive development: Policy options for Burkina Faso, Guinea, Gabon, Mali and Niger*. UNDP. Retrieved January 6, 2026, from https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/advancing_inclusive_development_report.pdf

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 25). *Persentase penduduk miskin Jawa Timur Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen dibandingkan September 2024* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1536/persentase-penduduk-miskin-jawa-timur-maret-2025-turun-menjadi-9-50-persen-dibandingkan-september-2024.html>

¹⁰ Ibid.

berkaitan dengan perbedaan akses terhadap kesempatan ekonomi, infrastruktur, layanan dasar, dan kualitas sumber daya manusia.¹¹ Dalam konteks Jawa Timur, keberadaan pusat-pusat pertumbuhan di beberapa koridor ekonomi berpotensi menciptakan spillover positif, tetapi juga dapat mempertajam disparitas apabila tidak diimbangi kebijakan pemerataan dan penguatan konektivitas wilayah.¹²

Selain indikator makro dan kesejahteraan, struktur sektoral perekonomian turut memengaruhi ketahanan dan kualitas pertumbuhan.¹³ Dominasi industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menunjukkan fondasi ekonomi yang relatif kuat, tetapi kinerja sektoral perlu dilihat dari kemampuan menciptakan nilai tambah, mendorong produktivitas, dan meningkatkan daya saing ekspor. Industri pengolahan sering disebut sebagai “mesin produktivitas” karena kapasitasnya menghasilkan output bernilai tambah tinggi serta menyerap tenaga kerja. Namun, tantangan yang umum muncul adalah rendahnya peningkatan nilai tambah (*upgrading*), keterbatasan integrasi ke rantai nilai global berkualitas tinggi, serta lemahnya keterkaitan antarsektor (misalnya pertanian–industri). Dengan demikian, analisis sektor penggerak menjadi penting untuk memahami mengapa capaian makro dapat terlihat baik, tetapi dampaknya pada kesejahteraan tidak selalu merata.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 melalui indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka, dan kemiskinan, serta menautkannya dengan dinamika struktur sektoral ekonomi daerah. Kajian ini menggunakan data sekunder dari lembaga resmi seperti BPS, Bank Indonesia, dan laporan pemerintah daerah, yang diperkaya dengan ringkasan sumber-sumber

¹¹ World Bank. (2024). *Poverty and inequality update (Special edition)*. World Bank. Retrieved January 6, 2026, from <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ec3d46c25a822d6d248e86d17179ea4e-0090012024/original/Poverty-and-Inequality-Quarterly-Update-3PR-Edition.pdf>

¹² Rodrik, D. (2013). *Structural change, fundamentals, and growth: An overview*. Retrieved January 6, 2026, from <https://drodrik.scholars.harvard.edu/publications/structural-change-fundamentals-and-growth-overview>

¹³ Badan Pusat Statistik. (2025, November 7). *Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi [Tabel statistik]*. Badan Pusat Statistik (BPS). Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI%3D/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

¹⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Opportunities for all: A framework for policy action on inclusive growth*. OECD Publishing. Retrieved January 6, 2026, from https://www.oecd.org/en/publications/opportunities-for-all_9789264301665-en.html

relevan untuk memberikan konteks kebijakan. Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya menyajikan gambaran komprehensif yang tidak berhenti pada capaian makro, tetapi juga menilai kualitas pertumbuhan melalui indikator kesejahteraan, sehingga dapat menjadi bahan refleksi kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Secara sistematis, pembahasan artikel ini diawali dengan metodologi dan sumber data, dilanjutkan dengan analisis indikator makroekonomi dan kesejahteraan, pembacaan struktur sektoral, serta implikasi kebijakan yang menekankan prioritas pada penguatan inklusivitas pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja formal produktif, dan integrasi sektoral—khususnya penguatan linkages antara pertanian dan industri—untuk meningkatkan produktivitas serta nilai tambah lokal.

B. Metodologi

1. Desain dan Pendekatan Penelitian¹⁵

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis dengan pendekatan studi dokumen (*document-based research*) berbasis data sekunder. Pendekatan deskriptif¹⁶¹⁷ digunakan untuk menggambarkan capaian indikator ekonomi Jawa Timur selama tahun 2025, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk menafsirkan keterkaitan antarindikator serta mengidentifikasi implikasi kebijakan dari temuan yang diperoleh.¹⁸¹⁹ Kerangka analisis dibangun dalam perspektif ekonomi regional dan kualitas pertumbuhan (*quality of growth*), yakni menilai kinerja ekonomi tidak hanya dari sisi pertumbuhan makro, tetapi juga dampaknya pada kesejahteraan (pengangguran dan kemiskinan) serta stabilitas (inflasi).

2. Ruang Lingkup dan Unit Analisis

a. Ruang lingkup wilayah: Provinsi Jawa Timur.

¹⁵ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.)*. SAGE Publications.

¹⁶ Patton, M. Q. (1999). *Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis*. Health Services Research, 34(5 Pt 2), 1189–1208. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1089059/>

¹⁷ Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method*. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

¹⁸ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

¹⁹ Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.

- b. Ruang lingkup waktu: Tahun 2025, dengan penggunaan data triwulanan (untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi jika tersedia) dan data periode rilis terbaru tahun 2025 (untuk kemiskinan dan pengangguran).
 - c. Unit analisis: indikator ekonomi makro dan kesejahteraan provinsi, meliputi:
 - 1) Pertumbuhan ekonomi (PDRB riil, pertumbuhan y-on-y)
 - 2) Inflasi (inflasi IHK)
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - 4) Kemiskinan (persentase penduduk miskin)
 - 5) Struktur sektoral (kontribusi sektor utama: industri pengolahan, perdagangan, pertanian)
3. Sumber Data dan Jenis Data²⁰

Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari institusi resmi dan dokumen kebijakan, meliputi:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS):
 - 1) PDRB dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
 - 2) Inflasi (IHK) wilayah kota/komponen jika tersedia
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - 4) Kemiskinan (periode Maret/September)
 - b. Bank Indonesia (BI):
 - 1) Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Jawa Timur
 - 2) Analisis permintaan agregat, inflasi, dan sektor unggulan
 - c. Dokumen Pemerintah Daerah (Pemprov Jatim/OPD terkait):

Rilis capaian indikator dan narasi kebijakan ekonomi
 - d. Sumber pendukung (media arus utama dan ringkasan lembaga/organisasi):

digunakan terbatas untuk melengkapi konteks (bukan sebagai data utama), terutama untuk narasi program, respons kebijakan, dan dinamika sektoral.
4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan berikut:

²⁰ International Labour Organization. (n.d.). *Statistics on the informal economy*. ILOSTAT. Retrieved January 6, 2026, from <https://ilostat.ilo.org/topics/informality/>

- a. Inventarisasi dokumen: mengidentifikasi publikasi resmi yang relevan sepanjang 2025 (rilis BPS, LPP BI, laporan Pemprov).
 - b. Ekstraksi data: mengambil angka-angka indikator utama (pertumbuhan ekonomi, inflasi, TPT, kemiskinan, kontribusi sektoral) serta narasi pendukung (faktor pendorong dan penghambat).
 - c. Penyelarasan periode: memastikan kesesuaian periode rilis antarindikator (misalnya: pertumbuhan triwulan I 2025 dibanding *year-on-year*, kemiskinan Maret 2025; TPT rilis 2025).
 - d. Validasi silang (*cross-check*): membandingkan angka dan tren antara BPS dan BI (atau dokumen daerah) untuk memastikan konsistensi informasi.
5. Definisi Operasional Variabel/Indikator

Untuk menjaga konsistensi pengukuran, indikator didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi: persentase perubahan PDRB riil Jawa Timur dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*).
 - b. Inflasi: persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada periode tertentu; digunakan untuk membaca stabilitas harga dan daya beli.
 - c. TPT (*Open Unemployment Rate*): persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun aktif mencari pekerjaan.
 - d. Kemiskinan: persentase penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (rilis resmi BPS).
 - e. Struktur sektoral: kontribusi sektor utama dalam pembentukan PDRB dan/atau pertumbuhannya.
6. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dalam beberapa langkah sistematis berikut:²¹

- a. Analisis deskriptif tren indikator
 - 1) Menggambarkan perkembangan indikator utama sepanjang 2025 (atau periode rilis terbaru) dalam bentuk narasi statistik.
 - 2) Menekankan arah perubahan (naik/turun/stabil) dan besaran perubahan.
- b. Analisis komparatif

²¹ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.

1) Membandingkan indikator Jawa Timur dengan rata-rata nasional (sejauh data tersedia) untuk menilai posisi relatif Jawa Timur.

2) Membandingkan capaian 2025 terhadap periode sebelumnya (misalnya 2024/semester sebelumnya) untuk menilai dinamika.

c. Analisis keterkaitan indikator (interpretatif)

1) Menautkan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, TPT, dan kemiskinan dalam kerangka *quality of growth*.

2) Contoh logika analitis: pertumbuhan stabil + inflasi rendah → stabilitas makro baik, tetapi jika kemiskinan masih tinggi → pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif.

d. Analisis struktur sektoral dan isu produktivitas

1) Mengidentifikasi sektor dominan (industri, perdagangan, pertanian) sebagai penggerak utama.

2) Menilai tantangan nilai tambah (*value-added upgrading*) dan keterhubungan sektor (*sectoral linkages*), terutama pertanian–industri.

e. Sintesis implikasi kebijakan

Merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan, dengan menekankan: inklusivitas pertumbuhan, kualitas pekerjaan, dan integrasi sektoral.

7. Uji Keabsahan Data (*Trustworthiness*)

Karena penelitian berbasis dokumen, keabsahan data dijaga melalui:²²

a. Kredibilitas sumber: prioritas pada publikasi BPS, BI, dan dokumen resmi pemerintah.

b. Triangulasi sumber: membandingkan informasi antar-sumber resmi dan dokumen pendukung.

c. Konsistensi definisi: menggunakan definisi indikator sesuai standar BPS/BI untuk menghindari bias interpretasi.

8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan:

²² Ibid.

- a. bersifat deskriptif-analitis sehingga tidak menguji hubungan kausal secara ekonometrik;
- b. ketergantungan pada rilis data periode tertentu tahun 2025;
- c. data media digunakan hanya sebagai penguat konteks kebijakan dan tidak diperlakukan sebagai data utama.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Makro

a. Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi 2025

Berdasarkan rilis statistik resmi, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 menunjukkan performa yang relatif stabil, dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 sekitar 5,0% (year-on-year).²³ Angka ini mengindikasikan bahwa laju ekspansi ekonomi daerah berada pada jalur pemulihan yang terkendali dan konsisten, terutama dalam konteks tekanan global yang masih berlangsung serta tuntutan pemulihan pascapandemi. Secara konseptual, pertumbuhan pada kisaran tersebut mencerminkan bahwa aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat berjalan normal, disertai stabilitas permintaan agregat yang cukup terjaga.

Stabilitas pertumbuhan juga menunjukkan bahwa Jawa Timur masih memiliki ketahanan ekonomi regional, terutama karena struktur ekonominya ditopang oleh sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, serta pertanian. Stabilitas ini penting karena daerah dengan basis industri dan perdagangan yang kuat biasanya lebih sensitif terhadap guncangan permintaan dan biaya produksi. Dengan demikian, capaian pertumbuhan yang relatif stabil dapat ditafsirkan sebagai indikator bahwa perekonomian Jawa Timur mampu beradaptasi dalam menghadapi variasi tekanan ekonomi eksternal maupun internal.

b. Pendorong Pertumbuhan dari Sisi Permintaan Agregat

Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tersebut terutama didukung

²³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, May 5). *Economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 1.14 percent (q-to-q); economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 5.00 percent (y-on-y)* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1494/economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-1-14-percent-q-to-q-economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-5-00-percent-y-on-y.html>

oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Dominasi konsumsi rumah tangga sebagai pendorong pertumbuhan merupakan karakteristik umum ekonomi daerah dengan basis populasi besar, di mana konsumsi menjadi penopang utama aktivitas perdagangan, jasa, dan sebagian industri.²⁴ Dalam kerangka makroekonomi, menguatnya konsumsi rumah tangga sering berkaitan dengan dua kondisi: (1) stabilitas harga relatif baik sehingga daya beli tidak tertekan secara signifikan, dan (2) aktivitas ekonomi dan pasar kerja cukup bergerak sehingga pendapatan masyarakat dapat dipertahankan.

Sementara itu, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan, terutama melalui belanja barang/jasa, program perlindungan sosial, serta belanja modal/infrastruktur yang memiliki efek pengganda (multiplier effect). Belanja pemerintah juga berfungsi sebagai countercyclical policy pada saat ekonomi menghadapi ketidakpastian: ketika sektor swasta menahan ekspansi, injeksi belanja pemerintah dapat menjaga sirkulasi permintaan dan aktivitas ekonomi lokal. Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, kontribusi belanja pemerintah perlu dibaca secara hati-hati: belanja yang efektif bukan hanya besarannya, tetapi juga kualitas alokasi, ketepatan sasaran, serta dampaknya pada produktivitas jangka menengah.

c. Pembacaan dari Sisi Produksi dan Ketahanan Struktur Ekonomi

Walaupun artikel ini tidak melakukan estimasi sektoral secara ekonometrik, stabilitas pertumbuhan dapat ditopang oleh struktur produksi Jawa Timur yang relatif berimbang antara sektor primer (pertanian), sekunder (industri pengolahan), dan tersier (perdagangan dan jasa).²⁵ Dalam teori ekonomi regional, struktur yang lebih terdiversifikasi cenderung membuat pertumbuhan lebih resilien, karena penurunan kinerja satu sektor dapat ditopang sektor lainnya.

Meski demikian, stabilitas pertumbuhan tidak otomatis berarti peningkatan kualitas produksi. Sektor industri pengolahan sering menjadi

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

penentu utama produktivitas dan nilai tambah. Jika pertumbuhan industri terjadi terutama pada segmen bernilai tambah rendah atau berbasis biaya (cost-based competitiveness), maka dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bisa terbatas. Karena itu, pembacaan pertumbuhan perlu dipadukan dengan analisis lebih lanjut terkait struktur nilai tambah, inovasi, dan kemampuan industrial upgrading.

d. Stabilitas Makroekonomi: Makna dan Indikator Pendukung

Pertumbuhan ekonomi yang stabil perlu dilihat dalam kerangka stabilitas makro, yakni kondisi ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, inflasi, dan pasar kerja. Stabilitas makro penting karena menciptakan predictability bagi pelaku usaha dan rumah tangga, yang pada akhirnya memperkuat iklim investasi dan konsumsi.

Dalam konteks Jawa Timur tahun 2025, stabilitas makro dapat ditafsirkan melalui dua logika utama:²⁶

- 1) Pertumbuhan relatif stabil → aktivitas ekonomi bergerak dan permintaan agregat cukup kuat.
- 2) Keterjagaan harga dan kondisi pasar kerja (dibahas lebih lanjut pada subbagian berikutnya) → mendukung kesinambungan pertumbuhan dan mengurangi risiko penurunan daya beli.

Namun, stabilitas makro yang baik tetap harus diinterpretasikan secara komprehensif. Dalam literatur ekonomi pembangunan, stabilitas makro sering dianggap sebagai *necessary condition* (syarat perlu) untuk pembangunan, tetapi bukan *sufficient condition* (syarat cukup) untuk pemerataan. Oleh sebab itu, artikel ini menekankan bahwa stabilitas makro harus disandingkan dengan evaluasi kualitas pertumbuhan.

e. Kualitas Pertumbuhan: Mengapa “Stabil” Belum Tentu “Inklusif”

Walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2025 berada pada level yang baik dan dinilai relatif stabil, kualitas pertumbuhan perlu menjadi perhatian utama. Konsep quality of growth menekankan bahwa pertumbuhan idealnya disertai:

²⁶ Ibid.

- 1) Peningkatan kesempatan kerja produktif,
- 2) Penurunan kemiskinan,
- 3) Serta penurunan ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok.

Pertumbuhan yang didorong konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah dapat menghasilkan stabilitas jangka pendek. Akan tetapi, bila pertumbuhan tidak cukup kuat ditopang oleh peningkatan produktivitas (misalnya melalui investasi bernilai tambah, industrial upgrading, dan penguatan keterkaitan antarsektor), maka dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan bisa tidak optimal. Dengan kata lain, pertumbuhan yang “stabil” perlu diuji lebih lanjut: apakah ia menciptakan pekerjaan formal produktif, meningkatkan pendapatan riil masyarakat, serta mempercepat penurunan kemiskinan.

Dalam kerangka ini, temuan pertumbuhan stabil menjadi pintu masuk analisis untuk bagian-bagian berikutnya (inflasi, pengangguran, kemiskinan), karena tiga indikator tersebut memberikan ukuran apakah stabilitas makro Jawa Timur juga bermakna sebagai inklusivitas pembangunan.

f. Implikasi Awal untuk Kebijakan Ekonomi Daerah

Dari hasil pembacaan pertumbuhan dan stabilitas makro ini, terdapat beberapa implikasi awal yang dapat dirumuskan:

- 1) Pemerintah daerah perlu mempertahankan momentum pertumbuhan berbasis permintaan domestik, namun secara simultan memperkuat sisi penawaran (*supply side*) melalui produktivitas dan nilai tambah.
- 2) Stabilitas makro perlu dikonversi menjadi stabilitas kesejahteraan, dengan memastikan bahwa penguatan ekonomi berdampak pada perluasan pekerjaan produktif dan penurunan kemiskinan.
- 3) Fokus kebijakan sebaiknya tidak hanya pada laju pertumbuhan, tetapi juga pada drivers yang lebih struktural: peningkatan kualitas investasi, penguatan industri bernilai tambah, serta integrasi sektor pertanian–industri untuk memperkuat basis produksi daerah.

2. Inflasi dan Pengangguran Terbuka

a. Inflasi: Stabilitas Harga dan Dinamika Pengendaliannya

Hasil kajian menunjukkan bahwa inflasi Jawa Timur pada 2025 relatif terkendali pada kisaran 1,0–1,1%, yang mengindikasikan stabilitas harga yang cukup baik dalam konteks perekonomian daerah. Inflasi rendah pada dasarnya mencerminkan dua hal utama. Pertama, ketersediaan pasokan barang/jasa relatif memadai sehingga tekanan harga dapat diredam. Kedua, permintaan agregat domestik—meskipun tetap menjadi penopang pertumbuhan melalui konsumsi rumah tangga—tidak menciptakan tekanan permintaan yang berlebihan (*demand-pull inflation*). Dengan kata lain, dinamika harga pada 2025 cenderung berada pada zona aman bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi pascapandemi, karena inflasi yang stabil dapat menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan ketidakpastian pelaku usaha.²⁷

Lebih jauh, inflasi rendah di Jawa Timur juga dapat dibaca melalui komposisi sumber tekanan harga yang lazim terjadi di tingkat provinsi. Dalam pengalaman banyak daerah, fluktuasi inflasi sering dipengaruhi oleh komoditas *volatile food* (misalnya bahan pangan strategis) serta *administered prices* (harga yang dipengaruhi kebijakan pemerintah). Stabilitas inflasi pada kisaran tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pasokan-distribusi relatif berjalan, dan koordinasi pengendalian inflasi—baik melalui kebijakan daerah maupun dukungan kebijakan nasional—cukup efektif. Namun demikian, inflasi rendah tidak selalu berarti “tanpa masalah”. Inflasi yang terlalu rendah juga perlu diuji secara hati-hati, karena dapat berkaitan dengan: (i) pelemahan permintaan pada kelompok tertentu (terutama rumah tangga rentan), atau (ii) daya dorong kenaikan pendapatan yang belum cukup kuat. Oleh sebab itu, interpretasi inflasi harus diletakkan dalam konteks indikator kesejahteraan seperti kemiskinan dan kualitas pekerjaan.

Dari perspektif pembangunan inklusif, inflasi yang terkendali merupakan enabling condition bagi kebijakan sosial-ekonomi. Stabilitas harga membantu pemerintah daerah dalam merancang program bantuan

²⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 1). *Juni 2025 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 2,02 persen; inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 2,76 persen* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/01/1500/juni-2025-inflasi-year-on-year--y-on-y--provinsi-jawa-timur-sebesar-2-02-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kabupaten-tulungagung-sebesar-2-76-persen.html>

sosial, menjaga keterjangkauan bahan pangan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih terprediksi. Dengan demikian, inflasi rendah pada 2025 dapat dipahami sebagai capaian stabilitas makro yang penting, meskipun tidak secara otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan.

b. Pengangguran Terbuka: Daya Serap Tenaga Kerja dan Kualitas Pekerjaan

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur yang berada pada kisaran 3,6% menunjukkan bahwa kapasitas pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja relatif baik dan, dalam beberapa pembacaan, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.²⁸ Angka ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan aktivitas ekonomi di 2025 disertai dengan pembukaan atau pemulihan lapangan kerja, sejalan dengan peran sektor-sektor utama Jawa Timur seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.²⁹

Namun, dalam kerangka *quality of growth*, TPT perlu ditafsirkan lebih luas daripada sekadar “rendah” atau “tinggi”. TPT yang rendah dapat terjadi bersamaan dengan beberapa realitas pasar kerja, misalnya:

- 1) Meningkatnya pekerjaan informal berproduktivitas rendah,
- 2) Pekerja yang terserap tetapi dengan jam kerja tidak penuh (*underemployment*), atau
- 3) Penyerapan tenaga kerja pada sektor dengan upah dan jaminan sosial yang terbatas.

Karena itu, capaian TPT yang relatif baik sebaiknya dibaca sebagai indikator awal yang positif, tetapi perlu dilengkapi dengan penilaian kualitas kerja: formalitas, produktivitas, stabilitas pendapatan, dan akses perlindungan sosial. Hal ini penting mengingat temuan lain dalam artikel menunjukkan bahwa kemiskinan masih berada pada level yang relatif tinggi, yang mengisyaratkan kemungkinan adanya kelompok pekerja miskin (*working poor*)—yakni mereka yang bekerja tetapi pendapatannya belum

^{28 28} Badan Pusat Statistik. (2025, November 7). *Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi [Tabel statistik]*. Badan Pusat Statistik (BPS). Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI%3D/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

²⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 25). *Persentase penduduk miskin Jawa Timur Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen dibandingkan September 2024 [Press release]*. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1536/persentase-penduduk-miskin-jawa-timur-maret-2025-turun-menjadi-9-50-persen-dibandingkan-september-2024.html>

cukup untuk keluar dari garis kemiskinan.³⁰

Dari sisi struktural, daya serap tenaga kerja di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh elastisitas kesempatan kerja pada sektor dominan. Sektor perdagangan dan jasa tertentu umumnya mampu menyerap tenaga kerja relatif cepat, namun sering diiringi tantangan produktivitas. Sementara itu, industri pengolahan berpotensi menciptakan pekerjaan yang lebih produktif dan berupah lebih baik, tetapi sangat bergantung pada investasi, teknologi, serta integrasi rantai pasok. Oleh karena itu, rendahnya TPT pada 2025 bisa menjadi sinyal baik bagi pasar kerja, tetapi agenda kebijakan yang lebih mendasar adalah memastikan penyerapan kerja terjadi pada sektor-sektor yang mendorong produktivitas dan nilai tambah.

c. Keterkaitan Inflasi dan Pengangguran dalam Stabilitas Makro³¹

Secara teoretik, inflasi dan pengangguran sering dipahami memiliki hubungan tertentu (misalnya melalui kerangka Phillips curve), tetapi dalam konteks daerah dan periode tertentu, hubungan itu tidak selalu linier. Temuan inflasi yang rendah bersamaan dengan TPT yang juga relatif rendah pada 2025 dapat mengindikasikan situasi stabilitas makro yang cukup kondusif: perekonomian tumbuh, harga terkendali, dan pasar kerja menyerap tenaga kerja. Namun, capaian ini masih menyisakan pertanyaan penting: mengapa kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi masalah? Jawaban awalnya mengarah pada aspek kualitas pertumbuhan—terutama kualitas pekerjaan dan distribusi manfaat pembangunan antarwilayah/kelompok sosial.

Dengan demikian, pembahasan inflasi dan pengangguran terbuka dalam artikel ini menegaskan bahwa Jawa Timur menunjukkan stabilitas harga dan performa pasar kerja yang cukup baik pada 2025, tetapi keberhasilan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang

³⁰ World Bank. (2024). *Poverty and inequality update (Special edition)*. World Bank. Retrieved January 6, 2026, from <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ec3d46c25a822d6d248e86d17179ea4e-0090012024/original/Poverty-and-Inequality-Quarterly-Update-3PR-Edition.pdf>

³¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 1). *Juni 2025 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 2,02 persen; inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 2,76 persen* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/01/1500/juni-2025-inflasi-year-on-year--y-on-y--provinsi-jawa-timur-sebesar-2-02-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kabupaten-tulungagung-sebesar-2-76-persen.html>

memperkuat link antara stabilitas makro dan kesejahteraan: penguatan pekerjaan formal produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar agar daya beli kelompok rentan tidak tergerus.

3. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Meskipun indikator makroekonomi Jawa Timur pada 2025 menunjukkan performa yang relatif stabil—ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inflasi yang rendah—temuan pada dimensi kesejahteraan mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata. Kondisi ini sejalan dengan literatur *quality of growth* yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa penurunan kemiskinan yang sepadan apabila struktur kesempatan ekonomi, kualitas pekerjaan, dan akses layanan dasar masih timpang.³²

a. Perkembangan Kemiskinan: Tren Menurun tetapi Masih Menjadi Isu Struktural

Persentase penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2025 dilaporkan berada pada kisaran 9,5%. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dibanding periode sebelumnya, namun dalam perspektif komparatif masih menandakan beban kemiskinan yang relatif signifikan jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional (sebagaimana sering disampaikan dalam berbagai ringkasan laporan ekonomi daerah). Secara analitis, kondisi “turun tetapi belum optimal” dapat mencerminkan dua hal:

- 1) Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya pro-poor, yakni belum cukup kuat mengangkat kelompok rumah tangga rentan dari ambang garis kemiskinan.
- 2) Kerentanan ekonomi rumah tangga miskin dan hampir miskin masih tinggi, sehingga sedikit guncangan pada harga pangan/biaya hidup atau pendapatan harian dapat mendorong mereka kembali ke status miskin (*poverty re-entry*).

Selain besaran persentase kemiskinan, penting juga membaca

³² Ibid.

kemiskinan sebagai fenomena dinamis, bukan statis. Kelompok “hampir miskin” (near poor) sering menjadi penjelas mengapa penurunan kemiskinan dapat berlangsung lambat: ketika ekonomi tumbuh, sebagian rumah tangga naik kelas, tetapi pada saat yang sama rumah tangga rentan lain turun kelas karena shock ekonomi, kesehatan, atau pekerjaan.

b. Kemiskinan dan Struktur Penghidupan: Isu Pendapatan, Produktivitas, dan Biaya Hidup

Secara konseptual, kemiskinan dapat dijelaskan melalui interaksi antara pendapatan/produktivitas dan biaya hidup. Pada wilayah dengan inflasi umum yang rendah sekalipun, tekanan biaya hidup dapat tetap tinggi pada komponen tertentu—terutama pangan—yang proporsinya besar dalam pengeluaran rumah tangga miskin. Dengan demikian, stabilitas inflasi agregat belum tentu identik dengan stabilitas beban pengeluaran kelompok miskin.³³

Lebih lanjut, struktur ekonomi Jawa Timur yang ditopang oleh industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menyiratkan adanya variasi besar pada kualitas pekerjaan:

- 1) di sektor informal (sebagian perdagangan/pertanian), pendapatan cenderung fluktuatif dan bergantung musim/permintaan;
- 2) di sektor formal (industri/pabrik), pendapatan relatif lebih stabil, namun akses masuknya mensyaratkan keterampilan tertentu dan lokasi yang dekat dengan pusat industri.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pengangguran terbuka dapat rendah, tetapi kemiskinan masih bertahan: masalahnya bukan sekadar “ada pekerjaan atau tidak”, melainkan “pekerjaannya produktif dan berupah layak atau tidak”. Dalam ekonomi regional, ini sering disebut sebagai persoalan working poor—kelompok yang bekerja namun pendapatannya masih berada di sekitar atau di bawah garis kemiskinan.

c. Ketimpangan Sosial dan Spasial: Antarwilayah dan Antarkelompok

³³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 25). *Persentase penduduk miskin Jawa Timur Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen dibandingkan September 2024* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1536/persentase-penduduk-miskin-jawa-timur-maret-2025-turun-menjadi-9-50-persen-dibandingkan-september-2024.html>

Selain kemiskinan, kajian ini menempatkan ketimpangan sebagai isu krusial. Ketimpangan dapat muncul dalam dua bentuk utama:³⁴

1) Ketimpangan antarwilayah (*spatial inequality*)

Kesenjangan antara kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan (perkotaan/koridor industri dan jasa) dengan wilayah yang bertumpu pada sektor primer (pertanian/perdesaan) berpotensi memperlebar jarak kesejahteraan. Pusat pertumbuhan biasanya memiliki:³⁵

- a) infrastruktur lebih baik,
- b) akses pasar kerja formal lebih besar,
- c) konektivitas logistik lebih kuat,
- d) layanan pendidikan dan kesehatan lebih berkualitas.

Sementara itu, wilayah non-pusat pertumbuhan sering menghadapi kendala keterhubungan, keterbatasan peluang kerja produktif, serta rendahnya diversifikasi ekonomi. Ketimpangan seperti ini menghambat efek sebar (*spillover effect*) dari pusat pertumbuhan ke wilayah pinggiran.

2) Ketimpangan antarkelompok sosial (*socioeconomic inequality*)

Perbedaan akses terhadap pendidikan, keterampilan, modal, dan jaringan pasar dapat menciptakan “stratifikasi ekonomi”. Kelompok dengan keterampilan rendah cenderung terserap pada pekerjaan berupah rendah dan rentan, sedangkan kelompok dengan keterampilan lebih tinggi mendapatkan akses pada pekerjaan formal produktif. Dalam jangka panjang, pola ini dapat melanggengkan ketimpangan lintas generasi (*intergenerational inequality*), terutama bila kualitas pendidikan dan layanan dasar tidak merata.

Dalam konteks indikator, ketimpangan biasanya dibaca melalui ukuran seperti rasio gini atau indikator distribusi pengeluaran. Namun, sekalipun data kuantitatif ketimpangan tidak ditampilkan rinci dalam artikel ini, indikasi ketimpangan dapat ditangkap dari pola: pertumbuhan relatif baik tetapi kemiskinan masih cukup tinggi dan disparitas wilayah

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

tetap menjadi catatan.

d. Mengapa Pertumbuhan Belum Sepenuhnya Inklusif?

Berdasarkan sintesis temuan, setidaknya terdapat beberapa penjelasan yang relevan:³⁶

- 1) Konsentrasi pertumbuhan pada sektor/area tertentu. Jika pertumbuhan dominan berasal dari sektor yang padat modal atau terkonsentrasi di koridor industri, maka dampaknya ke kelompok miskin—yang banyak berada di sektor informal dan perdesaan—menjadi terbatas.
- 2) Keterbatasan peningkatan nilai tambah pada sektor produktif masyarakat. Pertanian, misalnya, dapat menyerap tenaga kerja besar, tetapi tanpa peningkatan produktivitas, akses pasar, dan hilirisasi, pendapatannya cenderung stagnan.
- 3) Kualitas pekerjaan dan informalitas. Tingkat bekerja bisa tinggi, tetapi pekerjaan berupah rendah dan tidak terlindungi membuat mobilitas ekonomi rumah tangga miskin lambat.
- 4) Akses layanan dasar dan kesempatan ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan layanan pendidikan, kesehatan, serta konektivitas infrastruktur memperlemah kapasitas wilayah tertinggal untuk mengejar pusat pertumbuhan.

e. Implikasi Pembahasan terhadap Arah Kebijakan

Temuan pada sub-bagian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan ekonomi Jawa Timur perlu memberi tekanan lebih besar pada pemerataan dampak pertumbuhan, bukan hanya menjaga angka pertumbuhan. Secara operasional, konsekuensinya adalah:

- 1) Program pengentasan kemiskinan tidak cukup berbasis bantuan sosial, tetapi harus dikombinasikan dengan penguatan pendapatan dan produktivitas;
- 2) Strategi pembangunan wilayah perlu memperkuat konektivitas dan ekosistem ekonomi lokal agar spillover pusat pertumbuhan lebih efektif;

³⁶ Boarini, R., Murtin, F., & Schreyer, P. (2015). *Inclusive growth: The OECD measurement framework (OECD Statistics Working Papers, No. 2015/06)*. OECD Publishing.
[https://one.oecd.org/document/STD/DOC\(2015\)6/en/pdf](https://one.oecd.org/document/STD/DOC(2015)6/en/pdf)

- 3) Perbaikan kualitas pekerjaan—melalui pelatihan keterampilan, link and match industri, dan perluasan pekerjaan formal—menjadi kunci agar penurunan kemiskinan lebih cepat dan berkelanjutan.

Ringkasnya, kemiskinan Jawa Timur pada 2025 menunjukkan tren membaik, namun masih menyisakan tantangan struktural. Ketimpangan wilayah dan antarkelompok sosial menjadi faktor yang membatasi pemerataan manfaat pertumbuhan. Dengan demikian, agenda pembangunan yang paling mendesak adalah memastikan bahwa stabilitas makro diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang inklusif, melalui penciptaan kerja produktif, peningkatan nilai tambah sektor basis masyarakat, dan kebijakan pembangunan wilayah yang lebih berkeadilan.

4. Struktur Produktivitas dan Sektor Penggerak Ekonomi

Struktur perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 menunjukkan karakteristik ekonomi regional yang relatif matang, ditandai oleh dominasi sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Dominasi tiga sektor tersebut mengindikasikan bahwa mesin pertumbuhan Jawa Timur bertumpu pada kombinasi aktivitas produksi bernilai tambah (manufaktur), distribusi dan konsumsi (perdagangan), serta basis pasokan dan ketahanan pangan (pertanian). Struktur semacam ini umumnya memberikan ketahanan ekonomi yang lebih baik dibanding daerah yang terlalu bergantung pada satu sektor, karena sumber pertumbuhan menjadi lebih beragam dan responsif terhadap perubahan siklus ekonomi.

a. Industri Pengolahan sebagai “Mesin Produktivitas”

Sektor industri pengolahan sering disebut sebagai *productivity engine* karena memiliki tiga karakter utama: (1) kapasitas menghasilkan nilai tambah lebih tinggi, (2) potensi mendorong produktivitas tenaga kerja, dan (3) peran strategis dalam membangun keterkaitan sektoral (*backward and forward linkages*)—misalnya, menyerap input dari pertanian dan memasok output ke sektor perdagangan, logistik, serta ekspor. Dalam konteks Jawa Timur, penguatan sektor manufaktur bukan hanya berfungsi sebagai pendorong

pertumbuhan, tetapi juga menentukan kualitas pertumbuhan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif dan mendorong transformasi struktural dari aktivitas ekonomi primer menuju aktivitas bernilai tambah.

Namun demikian, temuan kajian mengindikasikan bahwa kinerja industri pengolahan Jawa Timur masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat akselerasi produktivitas dan peningkatan kualitas daya saing. Tantangan tersebut antara lain:

- 1) Keterbatasan peningkatan nilai tambah (*value-added upgrading*): sebagian aktivitas industri masih berada pada segmen produksi yang berorientasi pada proses (*processing*) dengan nilai tambah relatif rendah, sehingga peningkatan output belum sepenuhnya berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja maupun pemerataan manfaat ekonomi.
- 2) Keterbatasan inovasi dan adopsi teknologi: gap teknologi (misalnya otomatisasi, efisiensi energi, digitalisasi rantai pasok) membatasi kemampuan industri untuk meningkatkan produktivitas per tenaga kerja dan menekan biaya produksi.
- 3) Kualitas pekerjaan dan fleksibilitas pasar kerja: industri dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun transformasi menuju pekerjaan formal produktif masih memerlukan kebijakan penguatan keterampilan (*upskilling/reskilling*), sertifikasi, dan peningkatan standar produktivitas.

b. Daya Saing Perdagangan dan Konsumsi Domestik

Sektor perdagangan berperan penting dalam menopang pertumbuhan Jawa Timur melalui mekanisme permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan distribusi barang/jasa. Keunggulan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jaringan kota-kota ekonomi (Surabaya dan kawasan industri pendukungnya) membuat sektor perdagangan menjadi kanal utama transmisi pertumbuhan: ketika daya beli dan konsumsi meningkat, sektor ini tumbuh lebih cepat dan menjadi indikator awal stabilitas permintaan.

Namun, sektor perdagangan juga memiliki batasan dalam perannya sebagai penggerak utama produktivitas. Ketergantungan yang terlalu besar pada perdagangan dan konsumsi tanpa peningkatan kapasitas produksi

bernilai tambah dapat menimbulkan fenomena pertumbuhan yang “ramai di hilir” tetapi lemah di sisi “hulu” (produksi). Oleh karena itu, perdagangan yang kuat perlu dipadukan dengan industri pengolahan yang kompetitif agar pertumbuhan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menghasilkan nilai tambah dan peluang ekspor.

c. Pertanian sebagai Basis Ketahanan dan Tantangan Produktivitas

Sektor pertanian tetap memainkan peran signifikan, terutama terkait stabilitas pasokan pangan, pengendalian inflasi pangan, dan penyediaan lapangan kerja di wilayah pedesaan. Dalam ekonomi regional Jawa Timur, pertanian tidak hanya berfungsi sebagai sektor primer, tetapi juga sebagai sumber input bagi industri (agroindustri) dan perdagangan. Dengan demikian, produktivitas pertanian menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau wilayah non-perkotaan.

Namun, tantangan utama pertanian adalah kesenjangan produktivitas dibanding sektor industri, yang seringkali menyebabkan pendapatan pelaku pertanian relatif lebih rendah. Keterbatasan akses teknologi pertanian modern, efisiensi pasca panen, pembiayaan, serta fluktuasi harga komoditas menjadi faktor yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, penguatan pertanian melalui industrialisasi berbasis komoditas lokal (agro-based industrialization) dapat menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan memperkuat struktur ekonomi yang inklusif.

d. Tantangan Penetrasi Pasar Global dan Rantai Nilai

Kajian juga menyoroti bahwa meskipun Jawa Timur memiliki basis industri yang relatif kuat, penetrasi ke pasar global “berkelas tinggi” masih menghadapi hambatan.³⁷ Dalam kerangka *global value chains* (GVC), industri daerah dapat berpartisipasi pada berbagai level—mulai dari pemasok bahan baku, produksi komponen, perakitan, hingga desain/branding. Tantangan

³⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, May 5). *Economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 1.14 percent (q-to-q); economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 5.00 percent (y-on-y)* [Press release]. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1494/economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-1-14-percent-q-to-q-economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-5-00-percent-y-on-y.html>

utama Jawa Timur (dan banyak daerah industri) adalah kecenderungan tertahan pada level produksi dengan margin rendah, sementara nilai tambah besar berada pada level desain, teknologi, standardisasi kualitas, sertifikasi, dan merek.

Hambatan penetrasi tersebut dapat disebabkan oleh:

- 1) Standar kualitas dan sertifikasi internasional (misalnya standar keamanan produk, lingkungan, dan keberlanjutan) yang menuntut investasi tambahan dan penguatan tata kelola produksi.
- 2) Keterbatasan logistik dan efisiensi rantai pasok, yang memengaruhi biaya dan ketepatan waktu pengiriman.
- 3) Keterbatasan diversifikasi produk ekspor, sehingga komposisi ekspor rentan terhadap perubahan permintaan global atau fluktuasi harga.
- 4) Ketergantungan pada input impor tertentu (bahan baku/komponen), yang dapat menekan stabilitas biaya ketika kurs atau harga global bergejolak.

e. Keterkaitan Sektoral (Linkages) sebagai Kunci Peningkatan Produktivitas

Kualitas struktur ekonomi Jawa Timur sangat ditentukan oleh seberapa kuat keterkaitan antarsektor, terutama hubungan pertanian–industri–perdagangan. Keterkaitan yang kuat memungkinkan terbentuknya rantai nilai lokal: komoditas pertanian diproses oleh industri lokal, kemudian disalurkan melalui perdagangan dan didukung oleh logistik. Jika keterkaitan ini lemah, maka nilai tambah bisa “bocor” keluar daerah—misalnya komoditas dijual mentah tanpa proses, atau industri bergantung pada input luar sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati oleh pelaku lokal.³⁸

Oleh karena itu, penguatan linkages dapat ditempuh melalui: pengembangan agroindustri berbasis sentra produksi, kebijakan insentif substitusi input lokal, peningkatan kapasitas UMKM sebagai pemasok industri, serta program hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah di tingkat daerah.

f. Implikasi Analitis terhadap Kualitas Pertumbuhan

³⁸ Ibid.

Struktur ekonomi yang didominasi industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menjelaskan mengapa indikator makro Jawa Timur relatif stabil, tetapi dampak pada kesejahteraan masih menghadapi tantangan. Pertumbuhan yang ditopang konsumsi dan perdagangan cenderung cepat terlihat pada angka pertumbuhan, namun tanpa akselerasi peningkatan nilai tambah industri dan penguatan produktivitas pertanian, manfaat pertumbuhan dapat terpusat di wilayah tertentu dan kurang efektif menekan kemiskinan secara merata. Karena itu, transformasi struktural melalui peningkatan nilai tambah, inovasi, dan integrasi sektor menjadi kunci agar pertumbuhan Jawa Timur tidak hanya stabil secara makro, tetapi juga inklusif dan berdaya saing.

D. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka kami mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Inklusivitas Pertumbuhan: Strategi pembangunan harus lebih fokus pada pemerataan manfaat, terutama di wilayah yang mengalami ketertinggalan relatif.
2. Kualitas Lapangan Kerja: Investasi harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja formal yang produktif.
3. Integrasi Sektoral: Penguatan linkages sektor pertanian dengan industri guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk lokal.

E. Kesimpulan

Pertama, dari sisi struktur sektoral, perekonomian Jawa Timur pada 2025 menunjukkan karakter ekonomi regional yang relatif matang dan terdiversifikasi. PDRB Jawa Timur didominasi oleh tiga sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian, yang bersama-sama membentuk mesin pertumbuhan daerah melalui kombinasi produksi bernilai tambah, aktivitas distribusi-konsumsi, serta basis pasokan pangan. Diversifikasi ini memberikan ketahanan yang lebih baik dibanding perekonomian yang bertumpu pada satu sektor, karena sumber pertumbuhan lebih beragam dan adaptif terhadap perubahan siklus ekonomi.

Kedua, industri pengolahan berperan sebagai productivity engine utama

karena potensinya dalam menghasilkan nilai tambah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperkuat keterkaitan antarsektor (backward-forward linkages). Namun, efektivitas industri sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan masih dibatasi oleh tantangan struktural, terutama: (1) rendahnya value-added upgrading (dominasi proses produksi bernilai tambah rendah), (2) keterbatasan inovasi dan adopsi teknologi, serta (3) isu kualitas pekerjaan yang menuntut penguatan keterampilan, sertifikasi, dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan industri belum sepenuhnya bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata.

Ketiga, sektor perdagangan terbukti menjadi kanal penting pertumbuhan melalui dorongan permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan distribusi barang/jasa, didukung oleh jaringan perkotaan dan kawasan industri Jawa Timur. Namun, ketergantungan yang terlalu besar pada perdagangan dan konsumsi tanpa penguatan kapasitas produksi bernilai tambah berisiko menciptakan pertumbuhan yang kuat di sisi hilir tetapi lemah di sisi hulu. Karena itu, penguatan perdagangan perlu dipadukan dengan peningkatan daya saing industri agar pertumbuhan lebih produktif dan berorientasi nilai tambah.

Keempat, sektor pertanian tetap strategis sebagai penopang ketahanan pangan, stabilitas harga, dan penyediaan pekerjaan di wilayah pedesaan. Akan tetapi, kesenjangan produktivitas dibanding sektor industri serta keterbatasan teknologi, efisiensi pascapanen, pembiayaan, dan volatilitas harga komoditas masih menjadi faktor yang menahan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga pertanian. Dengan demikian, penguatan pertanian melalui agro-based industrialization menjadi agenda penting untuk mendorong pemerataan antardaerah.

Kelima, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan besar Jawa Timur terletak pada penetrasi pasar global dan peningkatan posisi dalam rantai nilai global (GVC). Hambatan berupa standar kualitas dan sertifikasi internasional, efisiensi logistik, diversifikasi ekspor, serta ketergantungan pada input impor membatasi kemampuan industri daerah untuk naik kelas menuju segmen bernilai tambah tinggi (desain, teknologi, branding). Hal ini memperkuat temuan bahwa kualitas pertumbuhan tidak cukup ditopang oleh aktivitas produksi semata, tetapi

juga oleh kemampuan melakukan upgrading dan integrasi global yang lebih berkualitas.

Keenam, dari perspektif kualitas pertumbuhan (quality of growth), struktur ekonomi yang relatif kuat dan stabil belum otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Tanpa penguatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah industri, serta integrasi linkages antarsektor, manfaat pertumbuhan cenderung terkonsentrasi pada wilayah dan kelompok tertentu, sehingga pengurangan kemiskinan dan ketimpangan berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, kinerja ekonomi Jawa Timur pada 2025 dapat dikategorikan stabil dan cukup kuat secara struktural, tetapi masih memerlukan kebijakan transformasi yang lebih tajam agar pertumbuhan menjadi lebih inklusif dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan kinerja ekonomi Jawa Timur tidak cukup berfokus pada pertumbuhan agregat, melainkan harus diarahkan pada strategi penguatan nilai tambah industri, produktivitas pertanian, keterkaitan sektoral, dan upgrading daya saing global, sehingga indikator ekonomi makro dapat berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

F. Daftar Pustaka

- Armstrong, H., & Taylor, J. (2000). *Regional economics and policy (3rd ed.)*. Phillip Alan Publishers Ltd. Londres.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025). *Provinsi Jawa Timur dalam angka 2025 [Statistical yearbook]*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/5ae8b994b1bebd8cbc2e0781/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 1). *Juni 2025 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jawa Timur sebesar 2,02 persen; inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 2,76 persen [Press release]*. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/01/1500/juni-2025-inflasi-year-on-year--y-on-y--provinsi-jawa-timur-sebesar-2-02-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-kabupaten-tulungagung-sebesar-2-76-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, July 25). *Persentase penduduk miskin Jawa Timur Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen dibandingkan September 2024 [Press release]*. Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1536/persentase-penduduk-miskin-jawa-timur-maret-2025-turun-menjadi-9-50-persen-dibandingkan-september-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, May 5). *Economy of Jawa Timur in*

- Q1 2025 grows 1.14 percent (q-to-q); economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 5.00 percent (y-on-y) [Press release].* Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1494/economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-1-14-percent-q-to-q-economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-5-00-percent-y-on-y.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2025, May 5). *Economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 1.14 percent (q-to-q); economy of Jawa Timur in Q1 2025 grows 5.00 percent (y-on-y) [Press release].* Retrieved January 6, 2026, from <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/1494/economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-1-14-percent-q-to-q-economy-of-jawa-timur-in-q1-2025-grows-5-00-percent-y-on-y.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025, November 7). *Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi [Tabel statistik].* Badan Pusat Statistik (BPS). Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI%3D/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Bank Indonesia. (2024, January 17). *Pemerintah dan Bank Indonesia sepakati tujuh langkah strategis jaga inflasi [News release].* Retrieved January 6, 2026, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_261724.aspx
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan perekonomian provinsi Jawa Timur: Mei 2025.* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2025.aspx>
- Bank Indonesia. (2025, February). *Laporan perekonomian provinsi Jawa Timur: Februari 2025.* Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur). Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Februari-2025.aspx>
- Bank Indonesia. (2025, May). *Laporan perekonomian provinsi Jawa Timur: Mei 2025.* Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur). Retrieved January 6, 2026, from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2025.aspx>
- Boarini, R., Murtin, F., & Schreyer, P. (2015). *Inclusive growth: The OECD measurement framework* (OECD Statistics Working Papers, No. 2015/06). OECD Publishing. [https://one.oecd.org/document/STD/DOC\(2015\)6/en/pdf](https://one.oecd.org/document/STD/DOC(2015)6/en/pdf)
- Bowen, G. A. (2009). *Document analysis as a qualitative research method.* Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.).* SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods.* McGraw-Hill.
- International Labour Organization. (n.d.). *Statistics on the informal economy.* ILOSTAT. Retrieved January 6, 2026, from <https://ilostat.ilo.org/topics/informality/>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry.* SAGE Publications.
- McMillan, M. S., & Rodrik, D. (2011). *Globalization, structural change and productivity growth* (NBER Working Paper No. 17143). National Bureau of Economic

- Research. Retrieved January 6, 2026, from
<https://www.nber.org/papers/w17143>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Opportunities for all: A framework for policy action on inclusive growth*. OECD Publishing. Retrieved January 6, 2026, from
https://www.oecd.org/en/publications/opportunities-for-all_9789264301665-en.html
- Patton, M. Q. (1999). *Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis*. Health Services Research, 34(5 Pt 2), 1189–1208.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1089059/>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Rodrik, D. (2013). *Structural change, fundamentals, and growth: An overview*. Retrieved January 6, 2026, from
<https://drodrik.scholars.harvard.edu/publications/structural-change-fundamentals-and-growth-overview>
- Thomas, V., Dailami, M., Dhareshwar, A., Kaufmann, D., Kishor, N., López, R. E., & Wang, Y. (2000). *The quality of growth*. Oxford University Press; World Bank. Retrieved January 6, 2026, from
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/756531468780293668/pdf/multi-page.pdf>
- United Nations Development Programme. (2025). *Advancing inclusive development: Policy options for Burkina Faso, Guinea, Gabon, Mali and Niger*. UNDP. Retrieved January 6, 2026, from
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/advancing_inclusive_development_report.pdf
- World Bank. (2009). *World development report 2009: Reshaping economic geography*. World Bank. Retrieved January 6, 2026, from
<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/19d4154e-b830-560d-bb24-0d6a9210d5c7/content>
- World Bank. (2024). *Poverty and inequality update (Special edition)*. World Bank. Retrieved January 6, 2026, from
<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ec3d46c25a822d6d248e86d17179ea4e-0090012024/original/Poverty-and-Inequality-Quarterly-Update-3PR-Edition.pdf>